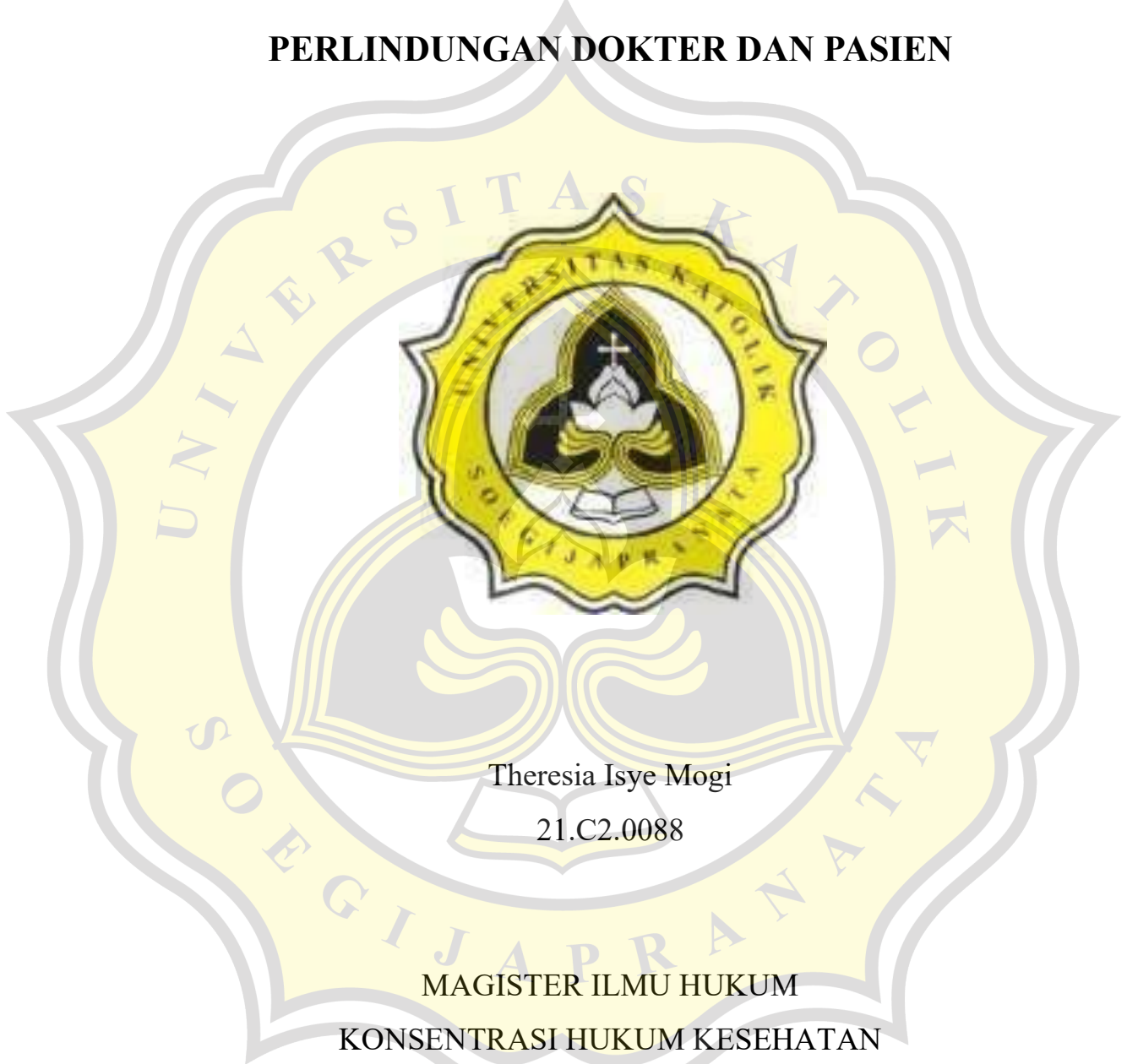


TESIS

PENGATURAN LAYANAN TELEREHABILITASI MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DOKTER DAN PASIEN



Theresia Isye Mogi

21.C2.0088

MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

TESIS

PENGATURAN LAYANAN TELEREHABILITASI MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DOKTER DAN PASIEN

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Theresia Isye Mogi

21.C2.0088

MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

Abstrak

Sejak pandemi COVID-19, layanan telerehabilitasi (TR) telah berkembang untuk mengatasi tantangan dan risiko dari pelayanan tatap muka langsung. Kemungkinan besar TR akan tetap digunakan setelah pandemi karena berbagai kelebihannya, seperti mengurangi hambatan geografis dan sosial ekonomi dengan menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil, pedesaan, maupun bagi individu yang memiliki keterbatasan mobilitas dalam akses layanan. Banyak inisiatif TR yang diluncurkan secara cepat selama pandemi yang hingga saat ini belum dipahami bagaimana TR dilaksanakan, hambatan, faktor pendukungnya, serta aturan hukum untuk dokter SpKFR sebagai pemberi layanan dan pasien sebagai pengguna layanan melalui platform digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan layanan telerehabilitasi yang ada saat ini dalam melindungi dokter SpKFR dan pasien

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam konteks layanan telerehabilitasi melalui *platform digital* dengan menyebar kuisisioner melalui *google drive* dengan melampirkan *google form* kepada para pakar hukum, dokter Sp KFR dan pasien selang bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Survei mencakup pengetahuan dan pengalaman dalam memberi dan menjalani layanan telerehabilitasi melalui *platform digital* dan landasan hukumnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa telerehabilitasi berbasis platform digital merupakan inovasi strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan, termasuk di wilayah terpencil, namun implementasinya di Indonesia terhambat oleh kekosongan hukum, ketidakpastian regulasi, dan keterbatasan infrastruktur. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas tidak hanya menghambat adopsi layanan, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran etika dan hukum, sekaligus melemahkan perlindungan bagi pasien dan tenaga medis. Karena itu, negara dan para pemangku kepentingan perlu segera membangun regulasi yang progresif, adaptif, dan inklusif, sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia, agar telerehabilitasi dapat dijalankan secara legal, aman, dan berkeadilan dan memberikan perlindungan bagi dokter dan pasien.

Kata kunci: Telerehabilitasi, Perlindungan hukum, Dokter dan pasien, *platform digital*

Abstract

Since the COVID-19 pandemic, telerehabilitation (TR) services have developed to address the challenges and risks of in-person healthcare delivery. It is highly likely that TR will continue to be used post-pandemic due to its numerous advantages, such as reducing geographical and socio-economic barriers by providing access to healthcare services for people in remote, rural areas, and for individuals with mobility limitations. During the pandemic, many TR initiatives were launched rapidly; however, the implementation of TR, its barriers, supporting factors, and the legal framework for Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) specialists as service providers and patients as users through digital platforms remain poorly understood.

This study aims to examine the current legal framework governing telerehabilitation services in protecting PM&R doctors and patients. The study employs a socio-legal approach in the context of telerehabilitation services via digital platforms, distributing questionnaires through Google Forms to legal experts, PM&R specialists, and patients from November to December 2024. The survey covers their knowledge and experiences in providing and receiving telerehabilitation services via digital platforms, as well as the legal basis for such practices.

The findings emphasize that digital platform-based telerehabilitation is a strategic innovation for expanding access to healthcare services, particularly in remote areas. However, its implementation in Indonesia is hindered by legal gaps, regulatory uncertainty, and infrastructure limitations. The absence of a clear legal framework not only impedes the adoption of these services but also poses ethical and legal risks, weakening the protection of both patients and healthcare providers. Therefore, the government and stakeholders must urgently establish progressive, adaptive, and inclusive regulations, while also strengthening digital infrastructure and human resource preparedness, to ensure telerehabilitation is implemented legally, safely, and equitably—providing protection for both doctors and patients.

Keywords: Telerehabilitation, Legal protection, Doctors and patients, Digital platform